

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cara pandang ‘belum makan nasi berarti belum makan’ sudah melekat di benak masyarakat Indonesia. Memang, nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia tetapi anehnya, jika belum makan yang namanya nasi, apapun makanan yang telah dikonsumsi walaupun sifatnya mengenyangkan, hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ‘kita sudah makan’.

Belum lengkap rasanya jika belum makan nasi. Cara pandang masyarakat inilah yang menyebabkan ketergantungan terhadap nasi. Beras menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya pangan Indonesia. (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, 2013:24)

Beras memang menjadi pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya telah menjadi budaya, dari sisi sosial masyarakat bahkan menganggap beras memiliki citra yang lebih baik dibanding dengan bahan pangan karbohidrat lainnya. (Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, 2012: 12).

Ketergantungan terhadap nasi (beras) ini membuat pemerintah Indonesia mengambil beberapa alternatif untuk mengurangi konsumsi pangan beras di Indonesia demi menanggulangi krisis pangan dunia. Menurut data FAO (*Food and Agriculture Organization*) 2012, kawasan Asia merupakan kawasan pengonsumsi beras terbesar di dunia dengan jumlah yaitu 1.056,4 juta per tahun. Di Indonesia konsumsi terhadap beras dapat dua kali lipat dari negara tetangga, bahkan tertinggi di dunia. (Arjuna, 2012)

Fakta ini diperkuat dengan 10 peringkat teratas negara dalam mengonsumsi jagung, gandum, dan nasi menurut *US Department of Agriculture, Production, Supply, & Distribution 2013*. Indonesia sama sekali tidak masuk peringkat dalam mengonsumsi jagung, dibandingkan gandum dan nasi, Indonesia termasuk dalam peringkat 3 teratas. Indonesia mendapatkan peringkat ke-2 sedunia dalam mengonsumsi gandum dan ke-3 dalam mengonsumsi nasi. (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, 2013:16).

Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras dari negara lain seperti: Vietnam, India, dan Thailand. Beras impor masih belum dapat dihilangkan, hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *detikFinance*, masih terdapat 51 ribu ton beras yang diimpor pada bulan September tahun 2013 yang seharga Rp. 306,2 miliar. Indonesia masih terus impor beras dengan harga mencapai Rp. 306 miliar dalam sebulan. (Maikel, 2013)

Menurut Menteri Pertanian Suswono dalam *Okezone* (2012), produksi beras Thailand hanya menghasilkan 20 juta ton per tahun, namun negara ini dapat melakukan ekspor dibandingkan dengan Indonesia yang dapat menghasilkan 37 juta ton per tahun tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan beras 200 juta lebih penduduk. Hal ini dikarenakan oleh jumlah penduduknya tidak sebesar Indonesia yang jumlahnya tiga kali lebih besar dibanding Thailand.

Tambahnya, Indonesia terlalu banyak mengonsumsi beras, sementara konsumsi umbi-umbian kecil dan menurun, sehingga perlu dilakukan pemanfaatan lahan dan produktifitas pangan pertanian. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok mengutip dalam *Revolusi Mindset* (2013), di tahun 2010 pangan selain beras dalam pola konsumsi pangan pokok nyaris hilang dibanding beras dan terigu dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri yang jumlah penduduknya sangat banyak. Ironis memang, disaat luas sawah Indonesia yang lebih luas dari Thailand justru harus mengimpor beras dari sana.

Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Dahlan Iskan mengatakan di tahun 2014, Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena cadangan beras di BULOG (Badan Urusan Logistik) sebanyak 3,6 juta ton dan 20% nya dalam bentuk gabah. (*detikfinance (tv)*, 2013). Pada tahun sebelumnya, 2012 -2013, Menteri Suswono pun mengatakan hal yang sama, dikutip dari Dakwatuna (2013) Indonesia tidak akan mengimpor beras karena cadangan beras di BULOG sudah cukup, yakni 2 juta ton.

Bayangkan yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia tetap memiliki ketergantungan terhadap nasi tanpa adanya penyediaan beras yang cukup. Sehingga, pemerintah mendorong untuk menggeser konsumsi bahan makanan pokok ke umbi-umbian untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras yang berlebihan. Upaya ini dilakukan juga untuk menganggulangi krisis pangan di masa mendatang.

Sementara tingginya konsumsi beras menyebabkan rendahnya konsumsi pangan nasional, mendorong Badan Ketahanan Pangan Nasional untuk melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi pangan. Hal ini juga penting untuk mengembangkan keseimbangan gizi dalam pola konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2012: 12-13).

Telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Komsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal, sehingga pengurangan beras bukan digantikan oleh konsumsi gandum/terigu yang hampir seluruhnya impor, melainkan oleh pangan lokal setempat, seperti sagu,

ubi kayu, ubi jalar, talas, pisang, labu kuning, dan sukun. (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2012: 13)

Diversifikasi pangan merupakan suatu amanah yang penting untuk dilaksanakan secara bersama-sama di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan, yang diwujudkan tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing setiap daerah dan juga saling mendukung, apalagi dalam upaya mengurangi kemiskinan. (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2012: 14)

Gerakan yang muncul akibat Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Gerakan “*One Day No Rice*”.

‘*One Day No Rice*’ (*ODNR*) adalah gerakan yang bermaksud menumbuhkan kesadaran untuk mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka mau mulai mengurangi konsumsi nasi dan mulai membiasakan mengonsumsi makanan yang bersumber daya lokal. Gerakan ini bukanlah untuk mengharamkan dan melarang mengonsumsi nasi. (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, 2013: i)

Kembali kepada kewenangan masing-masing daerah, sehingga tidak semua gerakan ‘*One Day No Rice*’ memiliki kebijakan yang sama dalam mempublikasikannya dan keberhasilannya. Depok adalah satu-satunya wilayah di Jawa Barat yang benar-benar mendukung gerakan *ODNR* dengan baik.

Walikota Depok adalah mantan Menteri Kehutanan RI dan memiliki latar belakang akademis dalam bidang pangan, sehingga beliau mempunyai kepedulian dan mendukung penuh terhadap gerakan *ODNR*.

Keberhasilan Depok dapat dibuktikan melalui penghargaan yang telah didapat oleh Walikota Depok, yaitu penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2013 kategori Pembina Ketahanan Pangan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. (Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, 2013:i)

Menurut Kepala Sub-Bagian, Analisa Kebijakan Publik Diskominfo, Rita, keberhasilan sosialisasi *ODNR* dapat terlihat juga dari media-media cetak dan televisi yang meliput langsung Walikota Depok dan kegiatan beliau tentang *ODNR*. Walikota pun tidak segan untuk menjadi narasumber dan memfasilitasi studi banding terhadap *ODNR* di Depok maupun di luar Depok.

Program diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688-Ekonomi tentang Gerakan “Satu Hari Tanpa Nasi” (*One Day No Rice*), pada tanggal 27 Desember 2011, yakni satu hari tanpa nasi pada hari selasa. (Dinas Komunikasi dan Informasi, 2013: 27).

Telah 3 tahun gerakan tersebut digalakkan, namun, keberhasilan gerakan *ODNR* masih seputar di area pemerintah Depok. Hal ini diakui oleh, Fathir Fajar, Koordinator Humas dan Sekertariat Depok, bahwa cara pandang masyarakat yang masih menganggap terlalu serius gerakan-gerakan yang berasal dari pemerintahan. Ditambah, media-media yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai media sosialisasi adalah tidak jauh dari artikel dan tulisan akademis, serta pemerintah kota Depok menyadari bahwa mengubah pola pikir adalah hal yang sulit sehingga dalam setiap sosialisasinya Walikota Depok melakukannya secara demokratis.

Apalagi dengan nama “One Day No Rice” yang berasal dari bahasa Inggris menambah pula “*keseriusan*” gerakan ini. Diakui olehnya lagi, gerakan *One Day No Rice*, sulit untuk “*out of the box*” sehingga sulit untuk mempunyai visual yang menarik dan dapat menggapai target gerakan yang seharusnya.

Fathir Fajar, Koordinator Humas dan Sekertariat Depok, menambahkan tujuan dari gerakan *'One Day No Rice'* adalah menciptakan sebuah *lifestyle* di kalangan anak-anak dan remaja. Pemerintah Depok ingin membuat cara pandang *keren* jika mengonsumsi pangan-pangan lokal. Hal inilah yang belum dapat dicapai oleh Pemerintah Depok sendiri

Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan dengan pembuatan media visual yang sesuai dengan target harapan Pemerintah Depok dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap jalannya gerakan *"One Day No Rice"* dan juga diharapkan dapat menyukseskan program pemerintah dalam menangani krisis pangan negara di masa mendatang.

Oleh karena itu dengan strategi pemasaran, media, dan visual yang lebih menarik akan dilakukan kepada remaja untuk mewujudkan harapan Pemerintah Depok dalam menjadikan *"One Day No Rice"* sebagai gaya hidup yang baru.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

1. Bagaimana upaya menanamkan pola pikir masyarakat Depok melalui gerakan *'ODNR'* bahwa konsumsi umbi-umbian akan berdampak positif terhadap diri sendiri dan negara Indonesia?
2. Bagaimana membuat gerakan *'ODNR'* menjadi lebih menarik dari melalui kampanye periklanan sehingga gerakan dapat menjadi gaya hidup masyarakat?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan dikaji adalah seputar keberhasilan sosialisasi dan pandangan gerakan “*One Day No Rice*”, serta pengkajian visual kepada masyarakat Depok sebagai proyek percontohan. Dengan segmentasi remaja dengan usia di atas 17 tahun, kemudian para dewasa berusia 26 – 35 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap media *ODNR*, pengetahuan mereka tentang *ODNR* dan permasalahan yang sebetulanya terjadi. Terakhir juga tentang pengetahuan pangan-pangan lokal yang menyehatkan untuk mengetahui seberapa besar para target peduli tentang kesehatan mereka sendiri.

1.3 Tujuan Perancangan

1. Upaya menanamkan pola pikir masyarakat Depok melalui gerakan ‘*ODNR*’ bahwa konsumsi umbi-umbian akan berdampak positif terhadap diri sendiri dan negara Indonesia.
2. Membuat gerakan ‘*ODNR*’ menjadi lebih menarik lewat kampanye periklanan sehingga gerakan dapat menjadi gaya hidup di antara masyarakat.

1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan dalam studi ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Sumber data dari instansi.
Sumber data yang akan diperoleh dari Instansi Depok dan Jawa Barat yang menangani langsung tentang pangan umbi-umbian terlebih tentang ‘*ODNR*’.

2. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang akan dilakukan kepada pihak yang mengetahui perkembangan sosialisasi gerakan *ODNR* dan kepada target harapan pemerintah untuk mengetahui dampak sebenarnya yang terjadi di mata mereka.

3. Observasi

Pengamatan langsung terhadap kegiatan *ODNR* yang terdapat di wilayah Depok. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar antusiasme para masyarakat dan pemerintahan Depok dalam melaksanakan gerakan ini.

4. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber yang terkandung di dalam buku dan data-data dari internet. Terutama buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Depok mengenai *ODNR* dan buku yang membahas tentang kesehatan akan mengonsumsi pangan lokal Indonesia dibanding beras.

Serta studi tentang kampanye dan komunikasi yang baik, dan juga pengetahuan tentang pangan-pangan lokal yang menyehatkan.

5. Kuisisioner

Kuisisioner disebarkan kepada responden harapan pemerintah Depok untuk mengetahui benar selera visual target, pengetahuan, serta permasalahan sebenarnya yang sedang terjadi diseperti mereka perihal *ODNR*.

1.5 Skema Perancangan

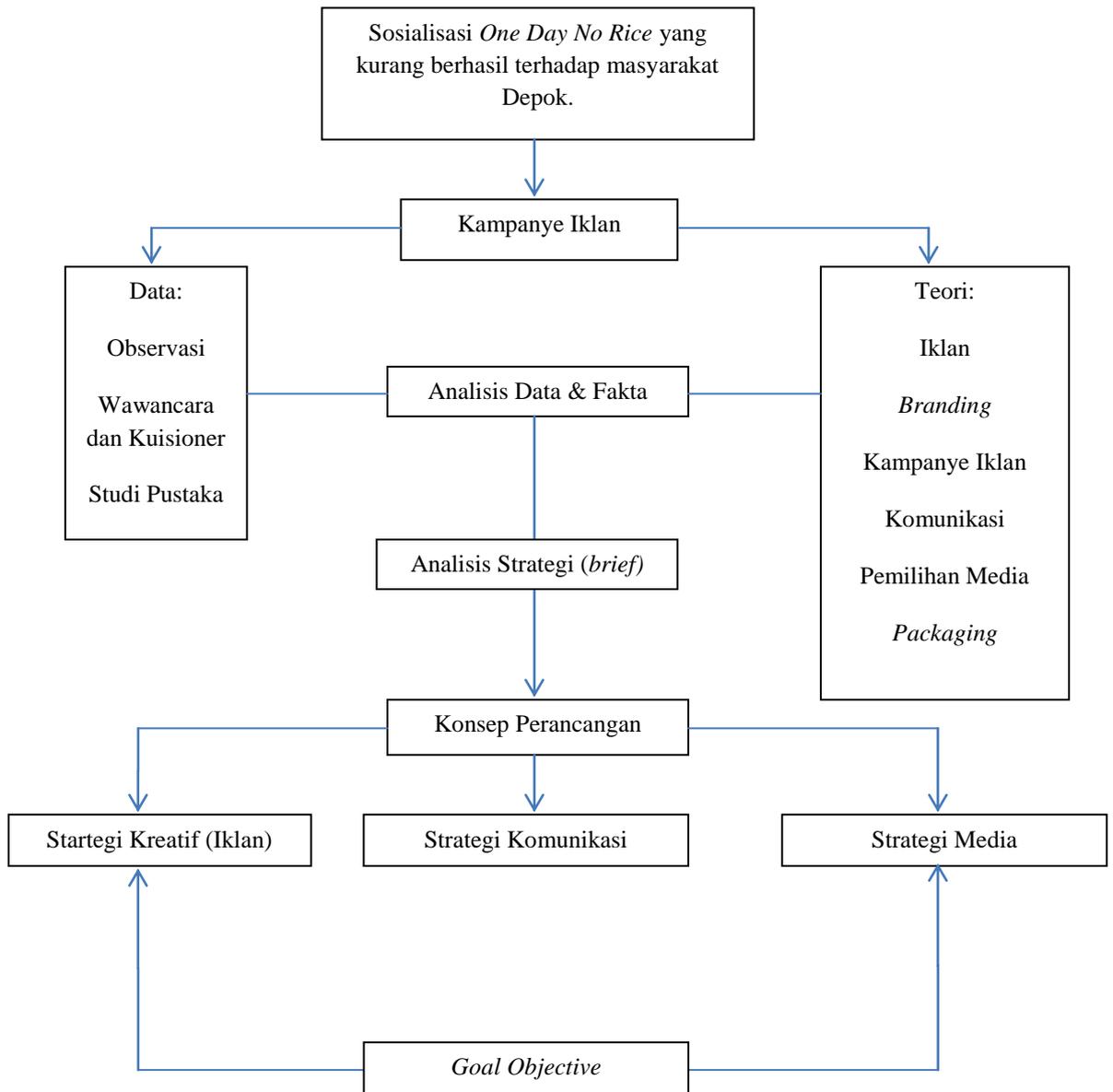


Diagram 1.1 Skema Perancangan